

2024

STUDI KELAYAKAN PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SIGI PENDEKATAN PENELITIAN PARTISIPATIF

Assessment Team:

Awaludin Aryanto, S.T., M.B.A.

Nur Safitri Lasibani, S.IP

Fira Tiyasning Tri Utari, S.Mat

Kontributor:

Tim Program PAKAGASI Sikola Mombine

Reviewer:

Dr. Andi Darmawati Tombolotutu, SE., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program PAKAGASI adalah Program Penghidupan yang Inklusif dan Peka terhadap Risiko bagi Penyandang Disabilitas dan Perempuan dalam Kondisi Kehidupan yang rentan untuk memperkuat pembangunan sosial ekonomi dan ketangguhan. Pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas memerlukan intervensi terarah dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan akses pada Sumberdaya. Upaya ini fokus pada peningkatan pemahaman keterampilan, bisnis, mitigasi bencana, dan mendorong kolaborasi. Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan meningkatkan partisipasi masyarakat juga hal yang penting untuk mencapai pemberdayaan secara menyeluruh.

Tiga kecamatan rawan bencana di Kabupaten Sigi yakni Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Dolo Selatan. Melalui dukungan ASB Germany bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Sikola Mombine menginisiasi Program PAKAGASI sebagai bentuk peningkatan kewirausahaan masyarakat untuk memperkuat mata pencaharian berkelanjutan bagi perempuan dan penyandang disabilitas di wilayah terdampak bencana alam di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum memulai implementasi program, Sikola Mombine melaksanakan Studi Kelayakan dan Asesmen Bisnis Potensial untuk Kelompok Usaha Perempuan dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sigi menggunakan metodologi Participatory Action Research (PAR) melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Key Informant Interview (KII) dengan menggunakan gap analysis.

Tujuan dilaksanakannya Studi Kelayakan ini adalah sebagai baseline data untuk menentukan pendekatan dan strategi implementasi program, mengetahui kondisi existing atau nilai awal untuk merasionalisasikan target capaian program, mengidentifikasi bisnis potensial yang ada di 3 kecamatan dampingan serta untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Adapun theoretical framework yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka McKinsey 7S sebagai alat analisis yang berguna untuk mengkaji keefektifan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks program pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah, kerangka ini memberikan pemahaman holistik dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan program. Selain mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kerangka ini juga menghasilkan wawasan yang dapat diimplementasikan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, kerangka ini membangun kepercayaan dan kepemilikan. Terakhir, kerangka ini menunjukkan perbandingan dengan program serupa atau kondisi sebelum bencana untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi praktik terbaik.

Penelitian ini melibatkan 143 masyarakat yang terdiri dari 54 orang laki-laki, 78 Perempuan, dan 10 Penyandang Disabilitas di 3 Kecamatan (Gumbasa, Dolo Selatan, dan Sigi-Biromaru) dan 10 Desa antara lain Desa Bangga, Desa Bulubete, Desa Rogo, Desa Pakuli Utara, Desa Simoro, Desa Omu, Desa Mpanau, Desa Lolu, Desa Pombewe, dan Desa Jono Oge terlibat dalam studi kelayakan ini. Selain itu, studi ini melibatkan berbagai stakeholder yang terdiri dari kategori Aparat Desa, Pengurus BUMDES, Pengurus Koperasi, Perempuan / Disabilitas yang memiliki Usaha, Tokoh Perempuan / Pemuda, Perempuan / Disabilitas Petani, Pengurus Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Perwakilan Lembaga Desa, Perempuan Tokoh Agama/Adat, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dan perwakilan NGO (Non-Governmental Organization) yang memiliki wilayah kerja di Sigi.

Hasil Studi Kelayakan ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dan perempuan masih membutuhkan pendampingan baik dari sisi peningkatan kapasitas, peningkatan produksi usaha, akses pemasaran serta mengoptimalkan peran BUMDes di 3 wilayah tersebut. Selain itu, Koperasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Kab. Sigi adalah Koperasi Simpan Pinjam, serta pengelolaan Koperasi masih berbasis manual. Untuk program di Pemerintah Kabupaten Sigi sendiri, masih memerlukan integrasi bersama masyarakat sipil, kolaborasi serta perlu adanya dukungan mekanisme regulasi dan anggaran terhadap keberlanjutan programnya, khususnya program unggulan SIGI MASAGENA.

Hasil yang diharapkan dari Program PAKAGASI

Terdapat 361 orang penyandang disabilitas dan 639 perempuan dalam situasi sulit dari 10 komunitas di Kabupaten Sigi menghasilkan mata pencaharian yang berkelanjutan dan membangun ketahanan terhadap risiko.

1.1.1 Pada tahun ketiga proyek, 639 perempuan dan 361 penyandang disabilitas berhasil mengurangi kerugian hasil panen/produksi akibat bencana cuaca ekstrem dan penyimpanan yang tidak tepat sebesar 10% dibandingkan data awal.

1.1.2 Pada tahun ketiga proyek, 500 perempuan dan penyandang disabilitas dari 10 komunitas proyek (50% dari 1.000 penerima manfaat proyek) mengalami peningkatan pendapatan sebesar 10% dari survei awal. (Diverifikasi melalui survei awal/akhir, observasi yang didokumentasikan)

1.1.3 Perempuan dan penyandang disabilitas menggunakan layanan berbasis kebutuhan dari Program Sigi Masagena untuk memperkuat mata pencaharian mereka. (diverifikasi melalui dokumen resmi Program Sigi Masagena seperti Roadmap, Action Plan, dan Survei Awal/Akhir)

Output 1 : Perempuan dan penyandang disabilitas memiliki keterampilan teknis dan kewirausahaan, mengambil tanggung jawab kepemimpinan dalam 10 kelompok usaha yang baru didirikan.

1.1 Pada akhir tahun pertama proyek, 639 perempuan dan 361 penyandang disabilitas telah meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu sosial, kewirausahaan, dan risiko terkait sebagai peserta Balai Belajar Kampung, mengembangkan kesadaran kritis, serta menjadi lebih percaya diri dan tangguh. Hal ini diverifikasi melalui survei awal-akhir, uji pre & post selama pelatihan, observasi yang didokumentasikan, dan "kisah dampak"

1.2 Pada akhir tahun pertama proyek, perempuan dan penyandang disabilitas (terutama anggota PKK, KWT, WIA, dan OPD yang sudah ada) diorganisir menjadi 10 kelompok usaha berdasarkan potensi pasar yang dianalisis/area dengan potensi keberhasilan, serta keterampilan dan sumber daya mereka.

1.3 Pada akhir tahun kedua proyek, 500 perempuan dan penyandang disabilitas telah memulai usaha mereka sebagai wirausahawan kecil (anggota kelompok usaha) berdasarkan konsep usaha/rencana bisnis yang baru dikembangkan dan menggunakan materi pembelajaran yang disediakan oleh proyek.

Output 2: Koperasi yang baru didirikan mendukung perempuan, penyandang disabilitas, dan usaha kecil lainnya di Kabupaten Sigi dalam hal akses keuangan, pengadaan, dan rantai pasokan.

2.1 Pada akhir tahun kedua, koperasi baru telah didirikan dan terdaftar di tingkat kabupaten untuk mempromosikan kewirausahaan di kalangan perempuan dan penyandang disabilitas, terutama dari 10 komunitas proyek.

2.2 Koperasi yang baru didirikan menerapkan sistem akuntansi digital dan manajemen yang transparan yang sepenuhnya mematuhi standar dan spesifikasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOPUKM).

2.3 Pada akhir tahun kedua proyek, setidaknya 500 pengusaha skala kecil di komunitas proyek memiliki akses terhadap bahan baku dan konsumen yang terjangkau dan berkualitas tinggi melalui toko koperasi yang baru didirikan di Kota Palu.

Output 3: Program pemerintah "Sigi Masagena" dan "Bumdes" mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas perempuan dan penyandang disabilitas, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesetaraan gender.

1.1 Pada akhir tahun kedua proyek, program Sigi Masagena menggabungkan setidaknya 5 referensi atau indikator konkret mengenai inklusi perempuan dan penyandang disabilitas, yang juga tercermin dalam anggaran pemerintah kabupaten.

1.2 Pada akhir proyek, 25 pertemuan multipihak dan 3 lokakarya multipihak telah berkontribusi pada perencanaan dan implementasi program Sigi Masagena yang lebih holistik. (diverifikasi melalui catatan pertemuan dan rencana kerja bersama yang disetujui oleh para pemangku kepentingan yang terlibat)

1.3 Pada akhir tahun kedua proyek, perempuan dan penyandang disabilitas di komunitas proyek telah diidentifikasi dan tercatat dalam database (DTKS) dan akan diberi penguatan ekonomi dan keterampilan kewirausahaan.



Sasaran Manfaat

Proyek akan dilaksanakan di **10 komunitas di tiga kecamatan** (Gumbasa, Dolo Selatan, dan Biromaru) di **Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia:**

1. **Gumbasa:** Terdiri dari 7 komunitas, Gumbasa menghadapi risiko bencana yang tinggi akibat peristiwa cuaca ekstrem. Rehabilitasi infrastruktur irigasi yang dimulai pada tahun 2016 terhenti akibat gempa bumi tahun 2018 dan likuifaksi tanah, menyebabkan sekitar 6.000 hektar lahan pertanian potensial tidak teririgasi. Gumbasa diidentifikasi sebagai salah satu daerah dengan risiko bencana tertinggi di Kabupaten Sigi, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem dan risiko gempa bumi.
2. **Dolo Selatan:** Dengan 12 komunitas yang terdampak parah oleh gempa bumi tahun 2018 dan likuifaksi tanah, Dolo Selatan mengalami tantangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Risiko banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi tetap tinggi. Penduduk, terutama di daerah Bangga, mengalami banjir bandang berulang, yang mengakibatkan relokasi. Meskipun beberapa keluarga pindah ke tempat tinggal permanen, sekitar 57 keluarga menunggu relokasi. Dolo Selatan memiliki 69 penyandang disabilitas (ODP) yang dilaporkan pada tahun 2021, banyak di antaranya terlibat dalam pertanian atau pertanian skala kecil, sementara beberapa tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. **Biromaru:** Terdiri dari 10 komunitas, Biromaru dikenal karena peternakan ternak, tetapi tantangan yang semakin meningkat termasuk kekeringan dan akses terbatas ke air bersih. Seperti kecamatan lainnya, Biromaru menghadapi risiko banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi yang tinggi. Kecamatan ini paling terdampak oleh gempa bumi tahun 2018 dan likuifaksi tanah, yang mengakibatkan kerusakan hunian yang signifikan. Pemukiman baru, "Housing Permanent Area Pombewe" (HUNTAP Pombewe), didirikan untuk korban bencana. Biromaru memiliki 234 ODP yang dilaporkan, dengan potensi dilaporkan secara kurang.

Tiga kecamatan di Kabupaten Sigi memiliki tantangan yang sama seperti gangguan ekonomi, risiko bencana tinggi, dan dampak gempa bumi dan likuifaksi tanah tahun 2018. Proyek bertujuan untuk mengatasi masalah ini melalui intervensi berbasis masyarakat, dengan menekankan keadaan unik dari masing-masing kecamatan.

ANALISIS DAN TEMUAN

Temuan terkait perempuan dan penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan kewirausahaan dan ingin mengambil peran kepemimpinan dalam mendirikan usaha kelompok:

1. **Tantangan Kewirausahaan:** Tantangan seperti kualitas output yang buruk, kendala pemasaran, dan kurangnya dukungan pemerintah menghambat keberlanjutan bisnis komunitas. Pelatihan kewirausahaan dan dukungan finansial yang lebih baik dibutuhkan.
2. **Tantangan Terkait Bencana:** Dampak bencana seperti gempa bumi, tsunami, COVID-19, dan banjir menyebabkan kerugian pekerjaan dan pengangguran yang dapat meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, dan penyalahgunaan narkoba.
3. **Kesenjangan Keterampilan dan Sumber Daya:** Perlunya keterampilan manajemen keuangan yang lebih baik dan dukungan yang ditingkatkan bagi penyandang disabilitas. Bisnis komunitas juga mengalami kesulitan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif serta mengelola keuangan dengan baik.

Komoditas Utama dan Tantangan Pembangunan:

Produk pertanian seperti jagung, cabai, dan kelapa mendominasi, namun persaingan dari perkebunan kelapa sawit dan kondisi cuaca buruk menjadi hambatan utama dalam produksi.

Kemampuan Saat Ini:

Pelatihan keterampilan teknis terbatas dan inisiatif kesiapsiagaan bencana yang minim menjadi kendala. Keterampilan manajemen keuangan dan orientasi pasar yang lebih baik diperlukan untuk mengembangkan bisnis komunitas.

Perencanaan Bisnis dan Koordinasi:

Kekurangan perencanaan bisnis formal menunjukkan perlunya program pelatihan tambahan. Masalah koordinasi dalam kelompok-kelompok tersebut menekankan pentingnya kepemimpinan dan komunikasi yang efektif untuk memastikan kesuksesan bisnis.

Keterlibatan Komunitas:

Meskipun ada partisipasi aktif dari organisasi seperti PKK, tantangan terkait prioritas dan kepentingan yang bersaing menghambat partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sistem dan Program Dukungan:

Meskipun Bumdes berperan penting, masih ada tantangan dalam implementasi dan program-program seperti literasi keuangan dan akses pasar perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Nilai Bersama dan Tujuan:

Meskipun nilai bersama dan tujuan ada dalam kelompok bisnis, diskusi eksplisit dan penguatan nilai-nilai ini diperlukan untuk memotivasi dan mengarahkan upaya bersama.

Strategi yang Digunakan:

Pemanfaatan peran Bumdes direncanakan untuk mengatasi pengangguran dan mendukung pengusaha. Rencana untuk meningkatkan keterampilan dan sertifikasi produk juga disorot sebagai strategi penting untuk meningkatkan akses pasar.

Analisis Kesenjangan

Analisis Kesenjangan Terhadap perempuan dan penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan kewirausahaan dan ingin mengambil peran kepemimpinan dalam mendirikan usaha kelompok:

1. Dalam kondisi saat ini, perempuan dan penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah sosial dalam masyarakat, tetapi mereka **belum mampu memahami akar penyebabnya atau merumuskan solusi untuk penyelesaiannya**. Hal ini menghasilkan kesenjangan dalam pemahaman yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif.
2. Meskipun memiliki beberapa keterampilan bisnis, **perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi kesenjangan dalam penguasaan yang komprehensif terhadap produksi, manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan**. Ini menunjukkan kebutuhan akan pelatihan yang lebih mendalam dan holistik dalam bidang bisnis.
3. Meskipun terdapat potensi besar untuk komoditas unggulan, **produksi terbatas oleh berbagai tantangan seperti cuaca, iklim, logistik, dan rantai pasokan**. Diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan ini agar potensi produksi dapat dimaksimalkan.
4. Walaupun beberapa individu telah terlibat dalam inisiatif pengurangan risiko bencana, **pengetahuan mereka tentang risiko bencana masih terbatas**. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang mitigasi bencana dan memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana.
5. **Praktik kewirausahaan saat ini cenderung dilakukan secara individual, tanpa memanfaatkan potensi kolaboratif yang lebih luas**. Diperlukan dorongan dan platform yang tepat untuk mendorong praktik kewirausahaan kolektif di kalangan perempuan dan penyandang disabilitas.
6. Meskipun terdapat forum dan organisasi seperti PKK yang aktif dalam pengembangan masyarakat, **masih terdapat tantangan dalam meningkatkan partisipasi yang lebih luas karena adanya prioritas yang bersaing**. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi antara berbagai kelompok dan organisasi.
7. **Peran Bumdes dalam kegiatan pasca-produksi seperti pengendalian produksi, pengendalian kualitas, dukungan rantai pasokan, dan pemasaran masih belum efektif dan efisien**. Koordinasi yang lebih baik dan strategi yang lebih terarah diperlukan untuk memperbaiki peran Bumdes dalam mendukung pengusaha lokal.
8. **Kurangnya perencanaan bisnis formal dan kurangnya manajemen bisnis yang memadai menjadi hambatan bagi pengusaha individu dan komunitas**. Diperlukan program pelatihan yang khusus dan terstruktur untuk membantu pengusaha dalam merencanakan dan mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif.
9. Upaya untuk memulai usaha kecil sebagai pengusaha (anggota kelompok usaha) telah dimulai, tetapi **masih ada kebutuhan akan pelatihan bisnis yang lebih terstruktur dan mendalam**. Praktik terbaik dan mentor bisnis juga diperlukan untuk membimbing bisnis baru ke arah yang sukses.

ANALISIS DAN TEMUAN

Temuan terkait pembentukan dan pengelolaan koperasi dalam mendukung kewirausahaan perempuan dan penyandang disabilitas.

- 1. Keberadaan Model Kooperatif yang Beragam:** Data menunjukkan adanya beragam model Koperasi di Kabupaten Sigi. Ini termasuk koperasi yang mengkhususkan diri dalam produksi pertanian, seperti koperasi Bisnis Kakao di Omu, dan Koperasi pakan ternak di Jono oge. Selain itu, terdapat juga koperasi yang beroperasi di bawah Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Biromaru dan Dolo Selatan.
- 2. Preferensi terhadap Konsep Koperasi yang Spesifik:** Temuan ini menyoroti preferensi penduduk lokal terhadap konsep koperasi tertentu. Misalnya, di Biromaru, terdapat keakraban yang lebih besar dengan koperasi simpan pinjam, sedangkan di Jonooge, masyarakat mengekspresikan permintaan yang lebih kuat untuk koperasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pertanian. Artinya setiap wilayah memiliki karakteristik hubungan kekerabatan yang berbeda sehingga pemilihan model koperasi perlu setiap wilayah beragam.
- 3. Tantangan dalam Manajemen Koperasi:** Tantangan dalam manajemen Koperasi terlihat, terutama dalam memastikan manajemen keuangan yang efektif dan pembayaran pinjaman. Masalah seperti kesulitan dalam pemulihan pinjaman, yang diperparah oleh bencana alam dan pandemi COVID-19, menjadi hambatan signifikan bagi keberlanjutan Koperasi.
- 4. Strategi untuk Pengembangan Koperasi yang Berkelanjutan:** Strategi untuk meningkatkan keberlanjutan koperasi termasuk meningkatkan sistem pemulihan pinjaman, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan memberikan insentif bagi kelompok koperasi yang teladan. Selain itu, dukungan pemerintah dianggap penting untuk pengembangan koperasi lebih lanjut.
- 5. Kesenjangan Keterampilan dan Pengetahuan diantara Kepemimpinan Koperasi:** Data menunjukkan kesenjangan dalam tingkat keterampilan dan pengetahuan para pemimpin Koperasi, terutama dalam manajemen keuangan dan pencatatan. Inisiatif peningkatan kapasitas, seperti sesi pelatihan tentang literasi keuangan dan kewirausahaan, dianggap perlu untuk mengatasi kesenjangan ini.
- 6. Pemanfaatan Akuntansi Digital dan Transparansi:** Meskipun ada pengakuan akan manfaat potensial dari sistem akuntansi digital untuk Koperasi, tantangan seperti literasi teknologi yang terbatas di antara anggota masyarakat menghambat penerapan digitalisasi keuangan dalam pengelolaan Koperasi. Namun, upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah untuk menerapkan solusi digital.
- 7. Nilai dan Tujuan yang diterapkan dalam Koperasi:** Nilai inti yang perlu dipegang teguh dalam menjalankan Koperasi meliputi kejujuran, kolaborasi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini memandu operasi koperasi dan menekankan pentingnya tindakan kolektif dalam mencapai tujuan bersama.

Analisis Kesenjangan

Analisis Kesenjangan terhadap pembentukan dan pengelolaan koperasi dalam mendukung kewirausahaan perempuan dan penyandang disabilitas:

- 1. Kesenjangan dalam Pendirian Koperasi:** Saat ini, tidak ada koperasi yang didirikan khusus untuk melibatkan dan mendorong perempuan serta penyandang disabilitas untuk mengembangkan bisnis. Hal ini mencerminkan kesenjangan signifikan dalam menyediakan dukungan dan sumber daya yang ditargetkan bagi kelompok-kelompok ini untuk terlibat dalam kewirausahaan.
- 2. Kesenjangan dalam Pengetahuan tentang Koperasi:** Mayoritas penerima manfaat hanya akrab dengan koperasi simpan pinjam, sementara sedikit yang mengenal koperasi produksi. Ini menunjukkan kesenjangan dalam pengetahuan dan paparan terhadap model-model koperasi yang beragam, yang dapat menghambat penerima manfaat untuk menjelajahi berbagai peluang bisnis dan kolaborasi.
- 3. Kesenjangan dalam Rencana dan Pengembangan Koperasi:** Tidak adanya struktur dan skema yang telah diidentifikasi untuk pendirian koperasi mencerminkan kesenjangan dalam perencanaan strategis dan pengembangan organisasi, yang menghambat penciptaan koperasi yang dapat mendukung kewirausahaan secara efektif dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.
- 4. Kesenjangan dalam Dukungan untuk Pendirian Koperasi:** Tidak adanya mekanisme dukungan untuk pendirian dan administrasi koperasi mencerminkan kesenjangan dalam menyediakan sumber daya dan bimbingan yang diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan dan tata kelola koperasi, sehingga menghambat realisasi inisiatif kewirausahaan yang didorong oleh koperasi.

Selain itu, analisis juga menyoroti beberapa kesenjangan yang terkait dengan koperasi yang sudah ada, termasuk kurangnya kapasitas pengelolaan yang memadai, kurangnya pengetahuan pasar, dan kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan dan potensi anggota/masyarakat lokal. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kinerja koperasi yang sudah ada dan memastikan bahwa koperasi baru dapat memberikan manfaat yang diharapkan kepada anggotanya dan mendukung kegiatan bisnis dengan efektif.

ANALISIS DAN TEMUAN

Temuan terkait program "Masagena" untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesetaraan gender.

- 1. Latar belakang dan Objektivitas Program "Masagena":** Program Masagena bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada segmen yang kurang mampu. Program ini telah berkembang dari awalnya hanya menargetkan kelompok miskin menjadi lebih luas mencakup pendidikan dan pelayanan kesehatan. Indikator keberhasilan termasuk peningkatan standar hidup, akses pendidikan melalui beasiswa, dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan untuk kelompok yang kurang terlayani.
- 2. Kerangka Regulasi dan Dukungan Anggaran:** Implementasi program Masagena didukung oleh mekanisme regulasi di tingkat lokal dan didanai oleh anggaran pemerintah daerah yang telah mencapai lebih dari 5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prioritas utamanya adalah keberlanjutan program tersebut.
- 3. Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Peningkatan Kapasitas:** Badan pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, memainkan peran kunci dalam program Masagena. Namun, koordinasi lintas OPD difasilitasi melalui pertemuan koordinasi lintas forum yang dipimpin oleh Bappeda. Fokus saat ini belum sepenuhnya menekankan upaya kolaborasi dan inklusivitas.
- 4. Harapan dari Pemerintah Daerah dan Upaya Kolaborasi:** Otoritas pemerintah setempat mengharapkan kolaborasi dan dukungan timbal balik di antara pemangku kepentingan untuk mengatasi keterbatasan program secara efektif.
- 5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev):** Meskipun Dinas Sosial aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk program Masagena, keterlibatan dari badan-badan lain seperti LTKL Gampiri masih kurang.
- 6. Peluang bagi Masyarakat Sipil dan Keterlibatan Multi-Sektoral:** Keterlibatan masyarakat sipil dan keterlibatan multi-sektoral dianggap penting untuk keberhasilan program. Kolaborasi antar sektor dianggap tidak terhindarkan dan bermanfaat untuk memastikan pendekatan holistik dalam pelaksanaan program.

7. Kriteria Penerima Bantuan Sosial (Bansos) : Kriteria penerima bantuan sosial dari Dinas Sosial terutama menargetkan individu yang berasal dari segmen ekonomi yang kurang mampu, meskipun detail spesifik tidak diuraikan. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kriteria multi kerentanan kemiskinan yang berbeda sehingga dapat mengakses jenis bansos yang beragam.

8. Memastikan Pemanfaatan Bantuan Sosial oleh Perempuan dan Penyandang Disabilitas yang Efektif: Untuk memastikan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas dapat memanfaatkan bantuan sosial secara efektif, diperlukan langkah-langkah yang ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan khusus mereka.

9. Akses, Manfaat, dan Fasilitas bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Sosial: Perempuan dan penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan sosial dapat mengakses berbagai manfaat dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

10. Proses Registrasi/Masukan untuk Data Kesejahteraan Sosial Terintegrasi (DTKS) dari Tingkat Desa hingga Tingkat Kabupaten: Proses pendaftaran data kesejahteraan sosial terintegrasi dimulai dari tingkat desa dan berlanjut hingga tingkat kabupaten.

11. Inklusivitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam DTKS: Meskipun telah ada upaya untuk mendaftarkan semua individu yang memenuhi syarat dalam Data Kesejahteraan Sosial Terintegrasi (DTKS), masih ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, belum sepenuhnya terdokumentasi.

12. Proses Implementasi Pertemuan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Musdes/Musrenbang): Proses pelaksanaan pertemuan pengembangan desa dan kecamatan melibatkan beberapa langkah dan mekanisme dan berfungsi sebagai platform bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait inisiatif pembangunan lokal dan alokasi sumber daya.

13. Inklusi Regulasi yang Mendukung Kebutuhan Perempuan dan Penyandang Disabilitas: Meskipun ada regulasi di tingkat regional, seperti Peraturan Bupati (Perbup), yang berfokus pada mitigasi bencana, masih ada kesenjangan dalam regulasi yang secara langsung menangani kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas.

Analisis Kesenjangan

Analisis Kesenjangan program "Masagena" untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan kesetaraan gender.

1. **Kesenjangan dalam Penyelarasan dan Inklusivitas Program:** Saat ini, tidak ada alat khusus untuk mengukur inklusivitas perempuan dan penyandang disabilitas dalam program. Harapan adalah bahwa program Sigi Masagena mencakup setidaknya 5 referensi atau indikator konkret mengenai inklusi perempuan dan penyandang disabilitas dalam anggaran pemerintah daerah. Namun, terdapat kesenjangan dalam referensi atau indikator konkret tersebut dan kurangnya pemantauan yang memadai untuk memastikan refleksi yang memadai dalam perencanaan anggaran pemerintah lokal.

2. **Kesenjangan dalam Kolaborasi Antar Instansi dan Pemangku Kepentingan:** Meskipun OPD, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, memainkan peran kunci dalam program Masagena, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. Harapan adalah adanya peningkatan dalam kapasitas profesionalisme melalui inisiatif pelatihan, namun fokus saat ini kurang menekankan upaya kolaborasi dan inklusivitas yang kuat. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam informasi mengenai keterlibatan masyarakat sipil, yang menunjukkan perlunya lebih banyak keterlibatan lintas sektor untuk mencapai kesuksesan program.

3. **Kesenjangan dalam Identifikasi dan Pengakuan Terhadap Kelompok Rentan:** Meskipun upaya telah dilakukan untuk mendaftarkan semua individu yang memenuhi syarat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih ada kemungkinan bahwa beberapa kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, mungkin tidak sepenuhnya terdokumentasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi yang ditargetkan untuk memastikan inklusi penuh kelompok-kelompok rentan dalam database DTKS.

4. **Kesenjangan dalam Peran dan Fungsi BUMDES:** Terdapat kesenjangan dalam keterlibatan kelompok-kelompok perempuan dan organisasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan kabupaten. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam fungsionalitas optimal BUMDES untuk mendukung inisiatif kewirausahaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Harapan adalah bahwa pilot BUMDES dapat mendukung inisiatif kewirausahaan untuk kelompok-kelompok ini, namun jumlahnya masih kurang memadai.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang diharapkan dari program Sigi Masagena, diperlukan upaya untuk memperbaiki koordinasi Lintas OPD khususnya OPD bidang kesehatan, pendidikan dan layanan sosial. Selain itu, organisasi perangkat daerah perlu meningkatkan inklusivitas program, dan memperkuat peran serta kelompok-kelompok rentan dalam proses perencanaan dan implementasi program. Dibutuhkan evaluasi program untuk memastikan perencanaan anggaran pemerintah kabupaten yang memadai.

Rekomendasi

1. Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Kewirausahaan

Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan penyandang disabilitas dengan melengkapi mereka dengan keterampilan teknis dan berwirausaha sambil mendorong peran kepemimpinan mereka dalam kelompok usaha yang baru dibentuk. Melalui pelatihan dan dukungan komprehensif, program ini bertujuan untuk memungkinkan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan ekonomi dan pengembangan masyarakat.

Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan teknis, kewirausahaan, dan kemampuan kepemimpinan di antara perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk terlibat dalam usaha wirausaha dan berkontribusi secara bermakna pada perekonomian lokal.

Rekomendasi Program:

- Pertemuan komunitas reguler untuk memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.
- Analisis potensi individu untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan.
- Pertemuan pengembangan bisnis untuk merumuskan strategi dan memperkuat kelompok usaha.
- Lokakarya pelatihan tentang berbagai aspek manajemen bisnis, termasuk produksi, branding, pemasaran, dan literasi keuangan.
- Bantuan dalam registrasi bisnis dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan.
- Dukungan dalam pengembangan rencana bisnis, akses ke fasilitas produksi, dan akses ke dukungan keuangan.

2. Pendirian dan Dukungan Koperasi Baru

Program ini berfokus pada pendirian dan mendukung koperasi yang baru dibentuk untuk membantu perempuan, penyandang disabilitas, dan bisnis kecil lainnya di Kabupaten Sigi. Tujuannya adalah untuk memberikan akses keuangan dan dukungan rantai pasokan, dengan demikian mempromosikan pembangunan ekonomi inklusif dan memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan koperasi yang efektif mendukung perempuan, penyandang disabilitas, dan bisnis kecil dalam mengakses keuangan dan pengadaan sambil memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan. Melalui pembangunan kapasitas dan infrastruktur, koperasi-koperasi ini akan berkontribusi pada ketahanan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi Program:

- Pertemuan koordinasi dan perencanaan dengan otoritas pemerintah terkait.
- Pertemuan keanggotaan dan pembentukan struktur koperasi.
- Pengembangan infrastruktur dan pembangunan kapasitas untuk manajemen koperasi.
- Pelaksanaan sistem manajemen digital untuk operasi yang efisien.
- Pendirian jaringan koperasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya yang relevan.
- Dukungan dalam mendirikan toko koperasi, pengembangan rantai pasokan, dan akses pasar.

3. Program Pembangunan Ekonomi Inklusif

Program ini bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan gender melalui inisiatif pemerintah seperti "Sigi Masagena" dan dukungan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan disabilitas ke dalam program-program ekonomi untuk memastikan keterlibatan aktif dan manfaat kelompok-kelompok terpinggirkan.

Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas khusus perempuan dan penyandang disabilitas. Melalui keterlibatan pemangku kepentingan, pembangunan kapasitas, dan inovasi program, inisiatif-inisiatif ini akan berkontribusi pada kesetaraan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Rekomendasi Program:

- Keterlibatan dengan otoritas pemerintah lokal untuk menyelaraskan program-program ekonomi dengan prinsip-prinsip inklusif.
- Penandatanganan perjanjian dan pertemuan rutin untuk memastikan implementasi program.
- Lokakarya dan sesi pelatihan untuk meningkatkan aspek inklusivitas dan keberlanjutan.
- Pembangunan kapasitas bagi Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan program pelatihan yang inklusif
- Acara publik untuk meningkatkan kesadaran dan menginformasikan pemangku kepentingan tentang program-program ekonomi inovatif.
- Dukungan untuk penguatan organisasi Organisasi Penyandang Disabilitas dalam program-program yang relevan.

DOKUMENTASI

FGD Kec.Gumbasa



FGD Kec.Dolo Selatan



FGD Kec.Sigi Biromaru



FGD Lintas OPD



FGD NGO & Komunitas



Assasment Data



Assasment Data



Assasment Data



Info Sikola Mombine:

**Jalan Sis Aljufri 01 No.11, Kelurahan Siranindi,
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94211**

Telephone : 0451- 4021143

Email :info.smombine@gmail.com,

Website: www.yayasansikolamombine.org

FB : sikola mombine, IG : @sikolamombine

Program ini didukung oleh:

